

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI BAGI MASYARAKAT DESA TETEY KECAMATAN DIMEMBE

Gerson Salomo Kolondam

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi berbagai pemerintah daerah bahkan pemerintah desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri hadir sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan yang sudah sejak tahun 2007 diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu kebijakan unggulan yang bertujuan mulai yakni mengatasi kemiskinan yang bertahun-tahun dialami bangsa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana implementasi Program nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri di Desa TeteY Kecamatan Dimembe.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini yaitu terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan penempatan program pembangunan yang diprogramkan untuk kemudian direalisasikan. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa program pembangunan yang diputuskan untuk dilaksanakan belum menyentuh kebutuhan krusial seluruh masyarakat seperti kebutuhan sarana air bersih, sanitasi, dsb. Hanya segelintir orang saja yang memiliki lahan kebun saja yang bisa menikmati hasil pembangunan di area perkebunan/pertanian yang dibangun melalui pendanaan program ini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri di Desa TeteY belum mampu mensejahterakan masyarakat setempat.

Kata Kunci : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri, Implementasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dialami oleh negara-negara berkembang. Meskipun kajian pengembangan masyarakat sebagian besar dihubungkan dengan permasalahan masyarakat dilingkungan sosial dan pelayanan masyarakat. Selama lebih dari dua dekade, permasalahan yang berbasis pengembangan masyarakat untuk

pengentasan kemiskinan semakin menjadi perhatian dari pemerintah. Sangat wajar ketika kemudian pengembangan masyarakat lebih dilakukan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, infrastruktur, pendidikan serta ketenagakerjaan khusus bagi masyarakat miskin. Jelas hal ini dilakukan karena kemiskinan merupakan akibat dari ketidakmampuan masyarakat memanfaatkan

sumberdaya yang ada, termasuk kemampuan mereka dalam mengakses informasi dan keikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan seringkali dibatasi bahkan direnggut oleh kekuasaan.

Erat kaitannya dalam melihat perkembangan zaman dengan makin deras arus globalisasi dan transparansi yang semakin banyak dibicarakan dalam forum diskusi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional bahkan lewat media massa yang mempersolakan sikap apatis masyarakat miskin terhadap pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah terhadap pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adaptasi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, masyarakat cenderung menggantungkan hidup pada bantuan pemerintah serta kritikan lainnya yang umumnya terkesan meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi sehingga dapat dilibatkan dalam proses-proses pelaksanaan pembangunan.

Beberapa tahun ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan-perubahan sosial yang cukup pesat. Namun sangat disayangkan, perubahan-perubahan tersebut tidak menghadirkan kemandirian dan

kesejahteraan bersama semua lapisan masyarakat. Kenyataan bahwa masih terdapat permasalahan kemiskinan yang berkaitan langsung dengan persoalan pengangguran, Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kemampuan dan peluang kerja.

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi penanganannya membutuhkan harus dilakukan oleh semua pihak terkait, bukan saja tugas pemerintah tetapi juga peran masyarakat miskin itu sendiri.

Guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah lewat kebijakan-kebijakan public yang telah ditetapkan yang dikemas dalam bentuk program-program nasional salah satunya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan di daerahnya, serta disisi lain meningkatkan kapasitas pemerintah dalam fasilitas pembangunan.

Untuk merespon masalah tersebut sebenarnya pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan seperti salah satunya Program nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri

(PNPM-Mandiri) yang sudah sejak tahun 2007 diimplementasikan di Indonesia.

Implementasinya, PNPM-Mandiri merancang proses pendampingan kepada masyarakat melalui beberapa tahapan melalui pendekatan partisipatif. Dalam pelaksanaan semua tahapan tersebut dilakukan melalui musyawarah dan pendekatan-pendekatan kelompok lainnya dimana masyarakat bisa bersama-sama. Melalui bersama tersebut diharapkan tumbuh kesadaran kritis masyarakat sehingga terbangun kepedulian, solidaritas, sikap mau berbagi agar terjadi ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat yang dilandasi oleh kejujuran, keadilan, cinta kasih dan kepercayaan. Apabila proses penyadaran kritis tersebut dapat berkelanjutan, maka diharapkan akan terjadi perubahan dari masyarakat yang dahulunya tidak berdaya, menjadi berdaya, mandiri dan pada suatu saat akan menjadi masyarakat madani.

Program ini ditujukan bagi daerah-daerah dengan jumlah masyarakat miskin relatif tinggi. Salah satu daerah Sebagai salah satu daerah yang menjadi sasaran program ini adalah Kabupaten Minahasa Utara yakni di Desa Tetey kecamatan Dimembe.

Desa Tetey menjadi lokasi sasaran PNPM-Mandiri secara tidak langsung turut mempengaruhi jalannya pembangunan fisik

seperti infrastruktur bagi masyarakat setempat.

Realisasi PNPM-Mandiri di Desa Tetey disepakati untuk melaksanakan beberapa program pembanguana fisik, seperti program pembangunan jalan kearah perkebunan yang dipandang oleh masyarakat setempat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang kemudian muncul adalah fasilitas-fasilitas umum yang sudah dibangun tidak dijaga dna dirawat.

Persoalan tersebut terjadi karena beberapa kendala yang dianggap menjadi pemicu seperti ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat setempat dengan realisasi program yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak ada kegiatan monitoring yang terencana dan terjadwal serta sikap apatis dari masyarakat setempat menyangkut pelestarian faslitas umum yang sudah dibangun.

Jika demikian, maka program ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, namun partisipasi dari masyarakat setempat juga sangat diharapkan dalam perencanaan program, pelaksanaan serta monitoring hasil pelaksanaan program. Agar program yang dijalankan merupakan apa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat serta daoat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang Sebab sudah banyak bukti

yang menunjukkan bahwa apabila inisiatif hanya datang dari satu pihak yakni pemerintah saja tanpa melibatkan aspirasi masyarakat akan memberi dampak buruk dalam tahapan pelaksanaan program itu sendiri. Terjadi banya monopoli, manipulasi serta tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat sehingga program tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan pada akhirnya masyarakat akan tetap pada kondisi semula yang miskin dan tidak berdaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan agaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Tetey Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara) serta dampak yang dirasakan masyarakat setempat terhadap hasil pelaksanaan program tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan. Sedangkan menurut Masmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2010), bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi

kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Lester dan Stewart (dalam Nugroho, 2005) mengungkapkan bahwa implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Dalam Kamus Webster dirumuskan secara pendek bahwa : *“to implement is to provide the means for carrying out ; to give practical effect to”*. (mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu; menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Berdasarkan pendapat tersebut, maka implementasi dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan.

2. Konsep Pemberdayaan

Adapun konsep pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata ”daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari arti kata tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaksud sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh

daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Yang dimaksud dengan pihak yang berdaya disini bisa dipahami sebagai pihak pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberdayakan pihak yang belum dan/atau tidak berdaya yakni masyarakat miskin.

Terjadinya pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal penting, yaitu : *pertama*, bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, maka pemberdayaan tidak mungkin dapat terjadi dengan cara apapun; *kedua*, bahwa kekuasaan dapat diperlunak.

Pengertian proses merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, Baik knowledge, attitude, maupun practiced menuju pada penguasaan, pengetahuan, sikap perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjukkan pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya,

kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan terwujud jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan, sekaligus disertai kesadaran akan perlunya untuk memperoleh daya tersebut.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan dalam (Suharto, 2010), yaitu; *pertama*; pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah dan tidak beruntung; *kedua*, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan berpengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya; *ketiga*, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan hidup orang lain yang menjadi perhatiannya; *keempat*,

pemberdayaan menunjuk pada suatu pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial; *kelima*, Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Berdasarkan berbagai perspektif dalam mendefinisikan pemberdayaan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan adalah suatu rangkaian proses, tujuan dan cara-cara tertentu dalam mencapai kesejahteraan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai suatu tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada suatu keadaan dan hasil yang akan dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya mulai dari sandang, pangan, papan, maupun kehidupan sosial mereka seperti kepercayaan diri, dapat menyampaikan pendapat/aspirasinya, mempunyai pekerjaan, mampu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial serta memiliki kemandirian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana hasil penelitian nantinya akan dibahas secara naratif natau mneggunakan kata-kata Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Desa Tetey Kecamatan Dimembe Minahasa Utara. Penelitian In terfokus pada implementasi program PNPM-Mandiri serta dampak yang dirasakan masyarakat setempat terhadap hasil program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketidakmandirian masyarakat adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Program ini dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembaharuan terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang sudah puluhan tahun diimplementasikan namun belum memberikandampak yang signifikan terhadap pengurangan jumlah masyarakat miskin secara nasinal. Selain itu, program-program sebelumnya hanya berorientasi pada bantuan langsung tunai baik dalam bentuk uang dan/atau barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah yang

dinilai membuat masyarakat miskin cenderung dinabobokan bahkan malas, tidak mengeksplor kemampuannya atau yang umumnya disebut dengan istilah tidak berdaya. Diharapkan dengan mulai diimplementasikannya PNPM-Mandiri di setiap wilayah di Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus melalui usaha dan kemandirian setiap individu masyarakat yang turut terlibat langsung dalam implementasi program maupun secara umum seluruh warga masyarakat yang ikut menikmati hasil dari pembangunan yang diprogramkan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Sejak tahun 1970-an telah mengupayakan berbagai program-program guna mengatasi masalah-masalah kemiskinan, dalam hal ini masyarakat diarahkan menjadi subjek pembangunan, yang bertumpu pada pemberdayaan.

Mulai tahun 2007, Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) sebagai salah satu program unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini berbasis pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pendekatan PNPM-Mandiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang

selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan era berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah merupakan wujud kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dari pemerintah serta pihak terkait lainnya untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang telah dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini ada dua, yakni *pertama*, tujuan umum yaitu untuk meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan kerja masyarakat miskin secara mandiri; *kedua*, tujuan khusus, yaitu sebagai berikut : meningkatnya partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, kelompok masyarakat lainnya yang rentan serta sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan pembangunan; meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*); meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya yang mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Melalui PNPM-mandiri, maka dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahapan monitoring dan evaluasi hasil program. Diharapkan dengan proses pembangunan yang partisipatif ini, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan hanya sebagai objek melainkan subjek pembangunan serta secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraannya.

Adanya pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat kedalam kerangka kebijakan PNPM-Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas sampai ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan.

Pengkajian secara kualitatif dapat dilakukan dalam rangka menyelidiki aktivitas pemerintah di Desa, yang merupakan landasan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana kinerja pemerintah serta disisi lain melihat bagaimana tanggapan masyarakat setempat mengenai kinerja pemerintah dalam

mengimplementasikan program PNPM-Mandiri.

Membahas menyangkut implementasi, berarti kita berbicara mengenai penerapan/pelaksanaan suatu kebijakan oleh semua pihak yang berwenang. Masyarakat adalah bagian terpenting dalam peneyelenggaraan pembangunan, karena pemerintah dan masyarakat merupakan dua elemen penting yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena itu, sangat diperlukan kerjasama yang solid antara keduanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian pun dengan penerapan program ini, harus ada kolaborasi yang baik antara pemerintah setempat dengan masyarakat. Tanggapan dari masyarakat merupakan salah satu penilaian penting bagi peningkatan kinerja semua pihak yang merupakan pelaksana program.

Adapun tahapan dalam program PNPM-Mandiri ini dimulai dari musyawarah bersama ditingkat dusun. Proses ini dimaksudkan untuk bisa menggali pendapat, masukan, keluhan, aspirasi dan harapan dari masyarakat yang ada di tiap dusun. Tahap ini didasarkan pada Peta Sosial Dusun.

Gagasan masyarakat tersebut merupakan pengembangan potensi atau solusi dari masyarakat yang dipetakan

dalam Peta Sosial Dusun. Gagasan-gagasan yang disampaikan masyarakat dalam tahap musyawarah bersama tersebut kemudian diwujudkan dalam proposal yang didokumentasikan oleh Tim Penulis Usulan (TPU) yang anggotanya juga adalah masyarakat biasa.

Tahap selanjutnya adalah seleksi proposal kegiatan ditingkat Kecamatan. Pada proses ini, seluruh proposal usulan yang ada dibahas kembali dalam musyawarah ditingkat Kecamatan. Musyawarah ini terbuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut hadir serta ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, memilih usulan desa yang telah diajukan untuk kemudian dapat didanai usulan programnya. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar desa yang ikut dihadiri para utusan dari tiap desa yang merupakan wilayah cakupan Pemerintah Kecamatan Dimembe. Prioritas usulan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dan Tim Verifikasi (TV) yang beranggotakan masyarakat desa yang dipilih dengan kualifikasi tertentu.

Setelah usulan program diterima dan kemudian ditetapkan dalam sebuah program kerja, selanjutnya program tersebut dilaksanakan di desa bersangkutan. Program ini dikerjakan oleh kelompok-kelompok

masyarakat yang anggotanya menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pengelola kegiatan ditingkat Desa masing-masing.

Fasilitator dan Konsultan akan mendampingi masyarakat dalam proses implementasi program di setiap jenjang mulai dari proses mendesain kegiatan, prasarana yang akan digunakan, anggaran, supervisi pelaksanaan, sertifikasi mutu, memberi sejumlah pelatihan/peningkatan kapasitas serta koordinasi lintas sektoral, Sedangkan para pekerja termasuk yang menjadi penerima manfaat dari program ini adalah warga desa yang bersangkutan.

Setelah program ini terlaksana, berbagai respon dan penilaian dari masyarakat setempat mengenai hasil program. Dari aspek manfaat yang mereka terima, sebagian besar warga desa Tetey merasakan beberapa manfaat dari hasil program yang ada, seperti : tersedianya akses jalan kearah perkebunan sehingga memberikan kemudahan bagi warga dalam melakukan aktivitas pertanian/perkebunan yang secara langsung memberikan meningkatkan taraf ekonomi mereka dan pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang makin baik. Disamping itu, dengan adanya program ini di desa, secara langsung memberikan peluang kerja bagi warga desa dengan keahlian-keahlian

tertentu. Atau dengan kata lain, dapat membuka lapangan kerja bagi warga setempat.

Dari sisi lain, perubahan pola pikir pun mulai mengalami peningkatan. Kesadaran dan kemandirian dari seluruh warga tentang kebutuhan yang paling krusial bagi kehidupan mereka dapat ditumbuhkembangkan. Setiap kebijakan ataupun program yang diimplementasikan sudah pasti memiliki kelemahan-kelemahannya tersendiri.

Dalam implementasi program PNPM-mandiri di Desa Tetey Kecamatan Dimembe pun tidak luput dari beberapa kekurangan yang kemudian dikritisi oleh masyarakat setempat. Meskipun memberikan manfaat yang sangat baik bagi kemajuan pembangunan sarana di desa tetapi kegiatan kerja pembangunan jalan kearah perkebunan/pertanian dirasa masih belum urgen diperlukan, sebab beberapa masyarakat desa menilai masih ada kebutuhan warga yang jauh lebih dibutuhkan, seperti keutuhan sarana air bersih, sanitasi, atau kelompok simpan pinjam desa yang bisa diprakarasi oleh para kaum perempuan, dan program lain yang menyentuh kebutuhan bahkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Disamping itu, rendahnya kesadaran dari warga masyarakat setempat

dalam menjaga sarana yang telah dibangun melalui program ini. sehingga, hasil pembangunan yang ada sudah rusak

Melalui penelitian ini maka dapat ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi proses implementasi yakni sebagai berikut : sulitnya mengumpulkan seluruh masyarakat dalam sosialisasi program di tingkat desa; kurangnya respon masyarakat terhadap program ini; kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang; tidak transparan dan akuntabel; adanya intervensi dari pemerintah setempat.

PENUTUP

Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-Mandiri) di Desa Teteuy Kecamatan Dimembe belum terlaksana dengan baik dan belum berhasil memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2010. *Analisis Kebijakan dan Formulasike Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho D, Riant. 2005. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Madia Grafindo.

Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sumber-sumber Lain :

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.

Perunjuk Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.